

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI SUMATERA
UTARA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA UTARA 2018
(STUDI KASUS DI KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH :

SRI JUNIARTI HASIBUAN

NPM : 148510017



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

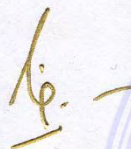
Judul Skripsi : Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 (Studi Kasus Di Kota Medan)

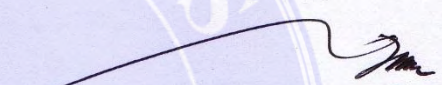
Nama : Sri Juniarti Hasibuan

NPM : 148510017


Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

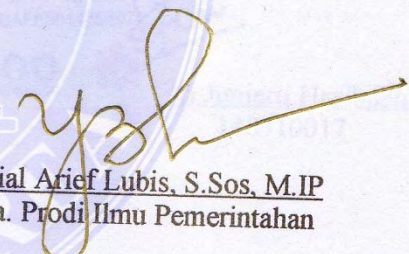
Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Dr. Abdul Kadir M.Si
Pembimbing I


Drs. M. Husni Thamrin, M.Si
Pembimbing II

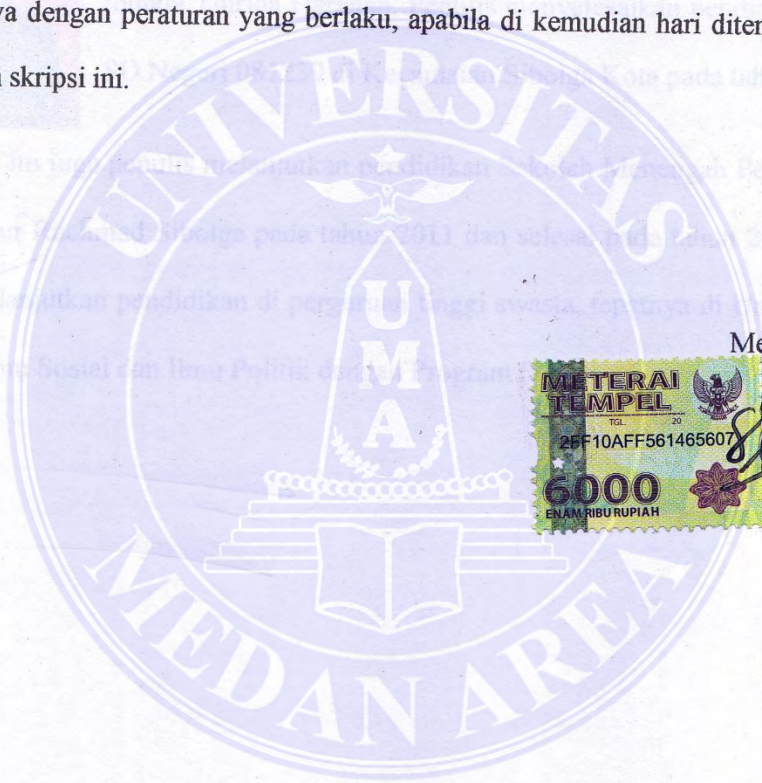



Dr. H. Her Kusmanto, MA
Dekan


Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP
Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 29 Januari 2019



Sri Juniarti Hasibuan
148510017

ABSTRACT

The Strategi Of The Election Commisson Of North Sumatera Province In Increasing Community Participation In The Election Of Governor Of North Sumatera 2018

(Case Study in Medan City)

Community participation at the time of the North Sumatera Governor Election is a very important aspect so that the General Election Commission uses a special strategy to increase public participation in the Gubernur Pemilihan of North Sumatera. The nature of this research is descriptive. The result of the research shows that the strategy of North Sumatera Provincial Election Commission in increasing the society participation in Sumatera Governor Election 2018 is seen from three stages namely the formulation stage shows there is clarity of socialization plan. The stage of action selection shows the implementation of socialization to the voters segment with the methode of socialization third stage of resource allocation namely by doing technical guidance to the committee. The constraints experienced by the Election Commission of North Sumatera Province is located on the allocation of human resources is very limited in the region.

Keyword : Participation Community, Pilkada, Strategy

ABSTRAK

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA UTARA 2018

(STUDI KASUS DI KOTA MEDAN)

Partisipasi masyarakat pada saat Pemilihan Gubernur Sumatera Utara merupakan suatu aspek yang sangat penting sehingga Komisi Pemilihan Umum menggunakan strategi khusus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Sifat pada penelitian ini adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Komisi Pemilihan umum Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 dilihat dari tiga tahapan yaitu tahapan formulasi menunjukkan adanya kejelasan perencanaan, kedua tahapan pemilihan tindakan dengan menunjukkan pelaksanaan sosialisasi kepada segmen pemilih dengan metode sosialisasinya ketiga tahap alokasi sumber daya yaitu dengan melakukan bimbingan teknis kepada panitia. Adapun kendala yang dialami Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yaitu terletak pada alokasi sumberdaya manusia yang sangat terbatas di daerah.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pilkada, Strategi

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dan tak lupa pula shalawat beserta salam senantiasa terucap kepada nabi Muhammad SAW serta kaum dan seluruh umatnya.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Dengan skripsi yang berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Studi Kasus Di Kota Medan)”.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak kesulitan yang dihadapi, namun dengan dukungan semua pihak sehingga akhirnya skripsi ini dapat selesai, meskipun masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada ayahanda Ridwan Hasibuan dan Ibunda Tiurida Harahap yang telah bersusah payah membesarkan, mengasuh, mendidik, serta memotivasi penulis secara moril maupun materil dengan penuh kasih sayang dan mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan bimbingan arahan serta doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, Meng, MSc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. H. Heri Kusmanto MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Abdul Kadir, M.Si, selaku pembimbing I penulis

4. Bapak Drs. M. Husni Thamrin Nst, M.Si, selaku pembimbing II penulis
5. Ibu Evi Kurniaty, S.Sos, M.IP, selaku sekretaris dalam penulisan skripsi
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta semua staf administrasi Universitas Medan Area
7. Bapak Mulia Banurea S.Ag, M.Si, Bapak Yulhasni S.S, Ibu Mimi Jalil, Bang Bobby dan Bang Irul yang telah membantu dalam memberikan informasi serta bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun daripada pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, dan semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat membantu.

Medan, 17 Juli 2018

Penulis

Sri Juniarti hasibuan
148510017

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| DAFTAR BAGAN | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 5 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 7 |
| 2.1 Pengertian Strategi | 7 |
| 2.1.1 Tingkat-tingkat strategi | 8 |
| 2.1.2 Tipe-tipe Strategi | 10 |
| 2.1.3 Pengertian Komisi Pemilihan Umum | 11 |
| 2.1.4 Pengertian Pilkada | 12 |
| 2.1.5 Pengertian Partisipasi Masyarakat | 13 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu | 21 |
| 2.3 Kerangka Pemikiran | 21 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 24 |
| 3.1 Jenis, Sifat, Fokus, Lokasi dan Waktu Penelitian | 24 |
| 3.1.1 Jenis Penelitian | 24 |
| 3.1.2 Sifat Penelitian | 24 |
| 3.1.3 Lokasi Penelitian | 25 |
| 3.1.4 Waktu Penelitian | 25 |
| 3.2 Informan Penelitian | 25 |
| 3.3 Fokus Penelitian | 25 |

| | |
|--|-----------|
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data..... | 26 |
| 3.5 Teknik Analisa Data..... | 29 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 31 |
| 4.1 Hasil Penelitian..... | 31 |
| 4.1.1 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara..... | 31 |
| 1. Sejarah Terbentuknya Komisi Pemilihan Umum Di Indonesia | 31 |
| 2. Sejarah Terbentuknya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara..... | 32 |
| 3. Visi dan Misi KPU Provinsi Sumut..... | 34 |
| 4. Struktur Organisasi KPU Provinsi Sumatera Utara..... | 36 |
| 5. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Provinsi Sumut..... | 36 |
| 6. Profil Komisioner KPU Provinsi Sumut 2013-2018 | 43 |
| 4.2 Pembahasan Penelitian | 45 |
| 4.2.1 Formulasi dan sasaran jangka panjang | 45 |
| BAB V SIMPULAN DAN SARAN..... | 59 |
| 5.1 Simpulan | 59 |
| 5.2 Saran | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 61 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Jurnal Penelitian Terdahulu | 21 |
| Tabel 2. Profil Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara 2013-2018..... | 43 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumut | 34 |
| Gambar 2. Peresmian Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumut Oleh KPU RI..... | 47 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat sekaligus perwujudan demokrasi. Gelombang demokrasi yang melanda hampir setiap negara dibelahan bumi termasuk di Indonesia telah membawa perubahan dalam tatanan politik Indonesia. Demokrasi secara sederhana dapat dijelaskan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka pemilu adalah sebuah keniscayaan dinegara demokrasi. Rakyat memilih sendiri pemimpinnya melalui pemilihan langsung baik di legislatif dan eksekutif. Tahun 2018 ini merupakan tahun politik dimana terdapat 171 daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan Kepala Daerah yakni salah satunya Provinsi Sumatera Utara.

Pemilihan Kepala Daerah memang merupakan peluang sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia pada umumnya dan bagi daerah-daerah khususnya dalam meningkatkan demokratisasi diatas tanah air. Bagi masyarakat, pilkada adalah peluang emas untuk menentukan sendiri tokoh-tokoh yang dianggap pantas, mampu dan layak menjadi Gubernur, Bupati maupun Walikota. Begitu pula baik elit politik daerah yang berminat bersaing, memiliki kapasitas dan kapabilitas, serta mempunyai visi untuk membangun daerah. Pilkada ini adalah momentum bagi elit politik daerah untuk menguji tingkat dukungan mereka di depan masyarakat lokal, apakah mereka benar-benar tokoh-tokoh masyarakat, atau lebih dari pecundang politik.

Keterlibatan masyarakat dalam konstelasi pilkada menuntut adanya partisipasi dari masyarakat. Partisipasi yang tinggi dari masyarakat dalam pilkada juga mengisyaratkan kelegitimasian calon kepala daerah tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum juga dapat menjadi bukti kedewasan kita dalam berdemokrasi. Maka dari itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat harus terus dilakukan termasuk dalam memfasilitasi

penyelenggaraan pilkada. Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu menyebutkan bahwa “untuk meningkatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan pemilihan umum yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum, sehingga dalam implementasinya dapat mewujudkan partisipasi masyarakat untuk mendukung terlaksananya pemilihan umum yang bersih, jujur dan adil sesuai dengan spirit demokrasi dan kearifan local di Indonesia”. Dalam Undang-Undang tersebut juga disebutkan bahwa “Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada masyarakat”.

Secara umum dapat digambarkan peran Komisi Pemilihan Umum yakni mengadakan sosialisasi, fungsionalisasi institusi pemerintahan secara proporsional, mampu membangun kerja sama dan koordinasi yang harmonis dengan desk pemilu dan konsisten dalam pelaksanaan regulasi sehingga Komisi Pemilihan Umum dapat menempatkan dirinya secara netral. Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Komisi Pemilihan Umum juga semakin menegaskan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat termasuk membangun kesadaran politik masyarakat.

Sumatera Utara yang akan melaksanakan pesta demokrasi pada tanggal 27 Juni 2018. Dimana ada sekitar 10.295.013 jiwa pemilih di Provinsi ini, dimana sebanyak 5.09.149 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 5.203.864 jiwa berjenis kelamin perempuan. (<https://www.tagar.id/kpu-sumut-tetapkan--9052529--dpt-pilgubsu-2018>, di akses pada tanggal 21 April 2018). Pilkada ini diikuti dua pasangan calon yakni Edy Rahmayadi beserta wakilnya Musa Rajeksa dan Djarot Syaifullah beserta wakilnya Sihar Sitorus. Ini berbeda dengan pilkada tahun lalu yang terdiri dari lima pasangan calon. Secara umum dinamika politik local di provinsi Sumatera Utara dapat terbilang paling dinantikan dalam

perpolitikan nasional hal ini dikarenakan kompetensi daya saing antara kedua pasang calon sangat baik dan untuk saat ini yang dibutuhkan masyarakat Sumatera Utara. Setidaknya kedua pasangan calon tersebut mewakili Sumatera Utara dari keseluruhan. Diharapkan pula hadirnya dua pasang calon diatas semakin meningkatkan partisipasi pemilih.

Bila di lihat kebelakang banyak pekerjaan rumah besar yang harus dilakukan KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam pilkada ini. Tercatat pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 tingkat partisipasi pemilih Sumatera Utara hanya mencapai 48,50%, yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 51,50% dan total partisipasi pemilih sebanyak 5.001.430 jiwa. (<https://news.detik.com/berita/2195547/tingkat-golput-dalam-pilgub-sumut-lebih-dari-50-persen>) Diakses pada 15 maret 2013 pada pukul 10.00 WIB.

Hal ini tidak sesuai dengan tugas dan peranan Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan amanat Undang-Undang diatas. Rendahnya tingkat partisipasi pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 5 tahun lalu menjadi tantangan tersendiri bagi Komisi Pemilihan Umum provinsi Sumatera Utara dalam mencari strategi yang taktis untuk menjaring pemilih. Boleh jadi Komisi Pemilihan Umum sudah harus melakukan inovasi dalam melakukan sosialisasi terkait pemilu kepada masyarakat Sumatera Utara dengan tidak hanya menggelar seminar saja namun dibutuhkan suatu solusi yang tepat karena rendahnya partisipasi di sumatera utara sudah terjadi sejak 2008. Kalaulah hal ini terjadi pada tahun 2018 ini maka sebuah kesalahan besar Komisi Pemilihan Umum tidak mampu meningkatkan kesadaran partisipasi politik masyarakat.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait persoalan tersebut dengan judul **“Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 (Studi Kasus di Kota Medan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 di Kota Medan.
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kota Medan.

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian harus ada tujuan agar penelitian yang dilaksanakan mempunyai arah sesuai dengan apa yang diinginkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Disamping tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian, penelitian ini juga bermanfaat. Adapun manfaat yang dicapai oleh penulis adalah:

1. Bagi Penulis khususnya, penelitian ini bermanfaat sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah. Serta menambah pengetahuan yang berkaitan dalam menganalisa permasalahan yang terjadi di masyarakat.
2. Bagi instansi terkait, penelitian ini dapat menjadi masukan atau sumbangan saran yang berguna bagi Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara dalam upaya penerapan proses

strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Strategi

Strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, Chandler (dalam Salusu 2015: 64). Dari ketiga langkah pelaksanaan strategi tersebut bila dilaksanakan dengan baik maka akan dapat mencapai hasil yang maksimal. Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu, Strategi yang digunakan yaitu dengan melakukan sosialisasi pemilu kepada masyarakat. Penerapan strategi sosialisasi tersebut dapat kita lihat dari tiga langkah pelaksanaan strategi antara lain sebagai berikut:

1. Formulasi dan sasaran jangka panjang

Formulasi dan sasaran jangka panjang merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting antara lain yaitu mengenai kondisi lingkungan serta identifikasi ancaman dan peluang, perhitungan mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi, identifikasi tujuan serta nilai-nilai organisasi yang hendak dicapai, serta syarat strategi tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

2. Pemilihan Tindakan

Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan suatu organisasi maka selain dibutuhkan suatu perencanaan strategi yang matang, hal yang sangat penting juga yaitu pada saat pelaksanaannya karena bilamana pelaksanaan strategi tersebut tidak dapat dijalankan dengan maksimal maka akan sangat berpengaruh terhadap hasil capaian yang akan diperoleh. Selain itu menurut Hitt dkk (dalam Salusu 2015: 167) mengatakan bahwa pada tahapan pemilihan

tindakan harus disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya yang dimiliki sehingga dapat tercapai misi utama organisasi tersebut.

3. Keterbatasan Sumber daya

Sumber daya merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya suatu kegiatan, bilamana sumber daya tersebut tidak memadai maka akan sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja yang akan diperoleh.

2.1.1 Tingkat-tingkat Strategi

Dengan merujuk pada pandangan dan Schendel dan Charles Hofer, Higgins (dalam salusu 2006: 101) menjelaskan adanya empat tingkatan strategi. Keseluruhannya disebut *Master Strategy*, yaitu *enterprise strategy*, *corporate strategy*, *business strategy*, dan *functional strategy*. Beberapa penulis lain seperti Wheelen dan Hunger (dalam salusu 2006: 101) mengenal tiga tingkatan strategi saja, yang didalamnya *corporate strategy* sudah mencakup *enterprise strategy*.

a. Enterprise strategy

Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada diluar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Didalam masyarakat yang tidak terkendali itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Kelompok-kelompok mempunyai interes dan tuntunan yang sangat bervariasi terhadap organisasi, sesuatu yang perlu diberi perhatian oleh para penyusun strategi. Jadi, dalam strategi interprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi.

b. *Corporate strategy*

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut *grand strategy* yang meliputi bidang yang digelut oleh suatu organisasi. Ini memerlukan keputusan-keputusan stratejik dan perencanaan stratejik yang selayaknya juga disiapkan oleh setiap organisasi.

c. *Business strategy*

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran ditengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi dihati para penguasa, Para pengusaha, Para anggota legislatif, Para donor, Para politisi, Dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh keuntungan-keuntungan stratejik yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ketingkat yang lebih baik.

d. *Functional strategy*

Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis strategi fungsional yaitu:

1. Strategi fungsional ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat.
2. Strategi fungsional manajemen, mencakup fungsi-fungsi manajemen, yaitu *planning, organizing, implementing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, decision making, refresenting dan integrating.*
3. Strategi isu stratejik, fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau selalu berubah.

2.1.2 Tipe-tipe strategi

Dalam mencoba menjelaskan tentang tipe-tipe strategi, Koteen (dalam Salusu 2006: 104) sesungguhnya tidak berbeda pandangan dengan Higgins, Wheelen dan Hunger, meskipun mereka yang disebut terakhir ini mengklasifikasikan strategi itu kedalam apa yang disebut tingkat-tingkat strategi. Tipe-tipe strategi dimaksud adalah sebagai berikut.

1. *Corporate strategy* (strategi organisasi).

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif stratejik yang baru.

2. *Program strategy* (strategi program).

Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi stratejik dari suatu program tertentu.

3. *Resource support strategy* (strategi pendukung sumber daya).

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

4. *Institutional strategy* (Strategi Kelembagaan)

Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif stratejik.

2.1.3 Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Atau Kota. Ayat 7 pasal ini menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum di Provinsi, sedangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di Kabupaten/Kota (ayat 8).

Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu komisi negara yang berposisi sebagai penunjang atas lembaga utama. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum dengan demikian tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan oleh UUD 1945. Lembaga negara penunjang disebut pula *auxiliary state body*, sedangkan lembaga negara utama disebut pula *main state organ*.

Dalam penyelenggaraan pemilu Komisi Pemilihan Umum bertugas dalam melaksanakan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum pemilu 2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4 tahun 2000 anggota Komisi Pemilihan Umum diharuskan non-partisipan.

2.1.4 Pengertian Pilkada

Dengan keluarnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang pemerintah telah resmi membekukan bahwa *recruitment* Kepala Daerah dilakukan dengan cara Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan dilaksanakan serentak.

Pilkada merupakan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat, pemilihan kepala daerah dilakukan bersamaan dengan wakil kepala daerah. Dimana kepala daerah diantaranya Gubernur untuk Provinsi, Bupati untuk Kabupaten dan Walikota untuk Kota. (Rahmat Hollyson Mz, 2015: 20)

Dalam sejarah sistem perekrutan ataupun pemilihan kepala daerah sejak indonesia merdeka, kita sudah mengeluarkan cukup banyak peraturan yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dari semua aturan yang dibuat tersebut dapat dikelompokkan sesuai periode dan sistem penyelenggaraan pemilihannya (Rahmat Hollyson Mz, 2015: 27). Periode dan sistem pemilihan tersebut dapat dibedakan atas tiga bagian yakni sebagai berikut:

1. Periode penunjuk Gubernur oleh Presiden atas pengusulan beberapa calon oleh DPRD Provinsi, sedangkan Bupati ditunjuk oleh Menteri Dalam negeri melalui pengusulan beberapa calon oleh DPRD Kabupaten/Kota.
2. Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota melalui pemilihan di DPRD Provinsi Kabupaten/Kota.
3. Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota

2.1.5 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting demokrasi perwakilan di sebuah negara demokrasi. Sayangnya dalam setiap pelaksanaan pemilu selalu ada persoalan terkait partisipasi masyarakat (Husni Kamil Manik 2014: 25). Persoalan itu tidak banyak diungkap, bahkan sebagian menjadi ruang gelap yang terus menyisakan pertanyaan.

Partisipasi masyarakat merupakan implementasi kedaulatan rakyat yang dimanifestasikan oleh keterlibatan pemilih dalam pesta demokrasi. Semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih dalam pemilu.

Sebagian masyarakat masih melihat pemilu sebagai ajang pencapaian kekuasaan semata dan tak memberi manfaat untuk perbaikan kedepan. Sebagian menilai para calon anggota legislatif suku mengumbar janji yang tidak dipenuhi. Akibatnya, pada pelaksanaan pemilu, masyarakat kurang peduli karena menganggap proses pemilu hanya buang-buang waktu dan tidak mempunyai manfaat. Masyarakat yang apatis berpandangan bahwa siapa pun yang bakal terpilih menjadi anggota legislatif tidak akan membawa pengaruh apapun terhadap hidupnya. Selain itu, ada kelompok yang berpandangan bahwa calon anggota legislatif itu-itu saja, kalau calon itu terpilih, maka akan sama saja dengan sebelumnya. Sebagian penyelenggara pemilu, KPU memiliki peran dalam melakukan sosialisasi kesemua lapisan masyarakat, tak terkecuali pemilih pemula, penyandang disabilitas, dan masyarakat termarjinalkan.

Makin tinggi tingkat partisipasi mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan.

Peserta pemilu pada pilkada serentak diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pemilih pada saat pencoblosan. Meskipun dalam pelaksanaannya, banyak sekali masalah-masalah yang ada di dalamnya. Diantaranya yaitu partisipasi masyarakat yang selalu mengalami pasang surut. sudah dijelaskan bahwasanya penurunan partisipasi pemilih pada pemilihan umum nasional yang diikuti penurunan partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah akan menjadi berita buruk bagi partai politik, terutama bagi kehidupan demokrasi Indonesia yang sedang berkembang. Partisipasi politik dalam pemilu adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik.

Partisipasi masyarakat Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 melonjak tinggi di bandingkan pada dua pilgub sebelumnya. Jumlah warga yang menggunakan hak politiknya melampaui angka 64 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), pada perhelatan sebelumnya hanya berkisar 48 persen. Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan KPU Sumut, terdapat 5.806.867 total suara pada pilgub 2018. Jumlah itu sekitar 64,2 persen dari 9.050.483 jiwa yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jumlah itu meningkat jauh dibandingkan dua perhelatan sebelumnya. Pada pilkada 2013, tercatat 5.001.430 orang yang menggunakan hak suaranya. Angka ini hanya 48,5 persen dari total 10.310.872 pemilih pada DPT Sumut.

Partisipasi masyarakat naik tajam, ini tertinggi dibandingkan dua pilgub sebelumnya. Kata Yulhasni, Komisioner KPU Sumut. Menurutnya, ada beberapa hal yang memicu peningkatan partisipasi masyarakat. “yang pertama sosialisasi kita diterima masyarakat, yang kedua kita memperbaiki kualitas pendataan,” jelas Yulhasni. Dari total suara yang masuk pada pilgub 2018, terdapat 5.7716.097 suara sah. Sementara 90.770 suara dinyatakan tidak sah. Pasangan nomor urut 1. Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas) memperoleh 3.291.137 suara atau 57,6 persen dari suara sah. Mereka unggul jauh dari rivalnya, pasang urut 2. Djarot saiful hidayat-sihar sitorus (Djoss) yang mendapatkan 2.424.960 suara atau 42,4 persen dari

suara sah. (<https://m.merdeka.com/politik/partisipasi-pemilih-di-sumut-melonjak-kpu-klaim-sosialisasi-berhasil.html#>), diakses 9 juli 2018.

Dengan demikian partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Menurut Maran (2007: 148), "bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (*voting*) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara"

Michael Rush dan Philip Althoff (2012: 100) mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

- a. menduduki jabatan politik atau administrasi
- b. mencari jabatan politik atau administrasi
- c. mencari anggota aktif dalam suatu organisasi politik
- d. menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik
- e. menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik
- f. menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik
- g. partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya.
- h. Partisipasi dalam diskusi politik internal
- i. Partisipasi dalam pemungutan suara

Dalam sistem perwakilan, keterlibatan warga negara harus dapat membantu meyakinkan bahwa aparaturnya bersikap responsif terhadap ketentuan dan tuntutan yang terdapat di antara sebagian besar warga negara. Ada dua pendekatan tentang keterlibatan warga negara yang telah dikembangkan yakni teori elitis dan partisipatori:

1. Pendekatan elitis, menegaskan bahwa demokrasi adalah suatu metode pembuatan keputusan yang mengokohkan efisiensi dalam administrasi dan pembuatan kebijaksanaan namun menuntut adanya kualitas ketanggapan pihak penguasa dan kaum elit terhadap pendapat umum.
2. Pendekatan partisipatori, keterlibatan yang lebih tinggi, karena sangat diperlukan untuk mendatangkan keuntungan seperti ini kita harus menegaskan kembali demokrasi langsung.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu menerjemahkan partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan perorangan dan atau kelompok dalam penyelenggaraan pemilu yang mempunyai peran yang sangat penting dalam pemilu. (Arif Supriyono, 2014: 70)

KPU dalam mendorong partisipasi masyarakat melakukan pemetaan program peningkatan partisipasi melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Sosialisasi informasi pemilu

Tujuannya untuk penyebarluasan informasi tahapan, jadwal dan program pemilu, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang kepemiluan dan mendorong peningkatan partisipasi pemilih. Sosialisasi pemilu dilakukan kepada masyarakat melalui mobilitas sosial, media massa, pengadaan bahan sosialisasi, serta pemanfaatan budaya memudahkan masyarakat dapat menerima informasi kepemiluan dengan baik.

2. Pendidikan Politik

Tujuan membangun pengetahuan politik, menumbuhkan kesadaran politik dan meningkatkan partisipasi politik. Pendidikan politik dilakukan melalui mobilisasi sosial, pemanfaatan penjangkaran sosial, media lokal, pembentukan relawan demokrasi kepemiluan serta bentuk-bentuk lain yang menjadikan tujuan dari pendidikan politik tercapai.

Menurut Rusadi Kantaprawira (2004: 55) pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.

Sedangkan Alfian (1992: 235) mengemukakan pendapat tentang pendidikan politik sebagai berikut, pendidikan politik (dalam arti kata yang lebih ketat) dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat sehingga memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.

Dengan demikian, pendidikan politik menurut Alfian sama dengan sosialisasi politik, yaitu proses menyampaikan atau menyebarkan program-program pemerintah (penguasa) kepada masyarakat dalam suatu sistem politik. Senada dengan Alfian, Wahab (dalam Komarudin 2005:

19) mengemukakan, bahwa pendidikan politik secara umum adalah sosialisasi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Keterlibatan dalam penyelenggaraan pemilu

Bentuk-bentuk keterlibatan masyarakat dalam penyelenggara pemilu antar lain dengan cara keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan keterlibatan dalam tahapan pemilu dan keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan pemilu.

Bingham Powel (dalam Arifin Rahman 2002: 62) yang mengkaji demokrasi secara empirik, deskriptif, institusional dan prosedural berdasarkan *political performance* menegaskan ciri-ciri demokrasi:

1. Legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyatnya, artinya klaim pemerintah untuk patuh pada aturan hukum didasarkan pada penekanan bahwa apa yang dilakukan merupakan kehendak rakyat.
2. Pengaturan yang mengorganisasikan perundingan (*bargaining*) untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui pemilihan umum yang kompetitif. Pemilihan dipilih dengan interval yang teratur, dan pemilih dapat memilih diantara beberapa alternatif calon.
3. Sebagai besar orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilihan, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon untuk menduduki jabatan penting.
4. Penduduk memilih secara rahasia dan tanpa dipaksa.
5. Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar, seperti kebebasan berbicara, berkumpul, berorganisasi dan kebebasan pers.

Keterlibatan warga negara disini, terutama merupakan suatu langka untuk mengendalikan tindakan-tindakan para pemimpin politik. Argumentasi teori elitis berpusat pada efisiensi dan ketidak mampuan para pemilih untuk menetapkan keputusan yang memadai. Dalam pandangan ini, warga negara yang memberikan suaranya, hanya lah suatu mekanisme untuk menengahi persaingan dan kompetisi antar elit. Kompleksitas dunia modren dan rangkaian persoalan yang menyertainya, nampaknya warga negara terkadang tidak menyadari betapa pentingnya partisipasi mereka dalam proses pembuatan keputusan. Nampaknya karena persaingan merupakan sarana yang paling tepat, maka pemilu tetap merupakan cara paling layak untuk menjamin persaingan yang berlangsung. Para teorisi elitis menegaskan, bahwa demokrasi dapat berproses di dalam dunia modren dengan catatan ia harus menggalang

partisipasi pada warga negara dalam jumlah yang lebih besar. Argumentasi diatas nampaknya bertentangan terhadap pluralisme masyarakat yang bersaing untuk merebut kekuasaan politik, karena persaingan dianggap sebagai sarana utama untuk melindungi keterlibatan warga negara dan hak-hak individu. Argumentasi bahwa selama persaingan itu bersifat jujur, tidak satu pun kelompok tunggal/elit dapat melakukan dominasi. Para penguasa saat ini selalu dikontrol agar tidak menyalah gunakan kekuasaannya oleh para elit yang ingin menggantikan mereka.

Tujuan utama sistem perwakilan dalam negara demokrasi adalah menyediakan sarana bagi para warga negara agar terbiasa melakukan kontrol tertentu terhadap pembuatan keputusan politik pada saat mereka tidak dapat secara langsung membuat keputusan itu sendiri. Hal ini didasari pemikiran, bahwa wakil rakyat tidak dapat mengabdikan seumur hidupnya, maka diciptakannya sarana lain berupa sistem pemilihan yang dilakukan secara periodik. Sistem pemilihan merupakan salah satu ciri utama sistem demokrasi.

Kekuasaan mayoritas umumnya dianggap sebagai ciri utama dan paling penting dari sistem pemilihan, karena ia merupakan cara untuk melegitimasi dan menunjukkan kuatnya tanggapan pemerintah terhadap harapan-harapan masyarakat. Kekuasaan mayoritas menimbulkan banyak persepsi, dapat diartikan mayoritas yang dikualifisir, mayoritas mutlak atau mayoritas relatif.

Menurut Rahman (2007: 288), tipologi partisipasi politik yaitu:

1. Partisipasi Aktif

Partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Artinya setiap warga negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan publik mengajukan alternatif kebijakan publik yang berlainan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah dan lain-lain.

2. Partisipasi Pasif

Partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

3. Golongan Putih (Golput)

Sekelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang dicita-citakan.

Menurut Rahman (2007: 289), model partisipasi politik terbagi dalam empat bagian yaitu:

1. Partisipasi Aktif

Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif.

2. Partisipasi Pasif (Apatis)

Sebaiknya kesadaran dan kepercayaan sangat kecil maka partisipasi politik menjadi pasif.

3. Militan (radikal)

Kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah lemah maka perilaku yang muncul adalah militan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dilihat dari pendekatan melalui peneliti sebelumnya (jurnal) diantaranya :

Tabel 1. Jurnal Peneliti Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Judul Jurnal | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---------------------|--|-------------------|---|
| 1. | Petrus Gleko (2017) | Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum Kepala Daerah | Metode kualitatif | Kendala strategi KPU Malang dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu tahun 2015 antara lain: 1. Kurangnya dukungan untuk sosialisasi, 2. kurangnya respon masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dari KPU, 3. Keterbatasan sumberdaya. |
| 2. | Dwi haryono (2016) | Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015 | Metode kualitatif | Strategi atau upaya yang dilakukan KPU Samarinda dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015 antara lain: strategi penguatan kelembagaan, strategi sosialisasi politik, strategi pendidikan pemula. |

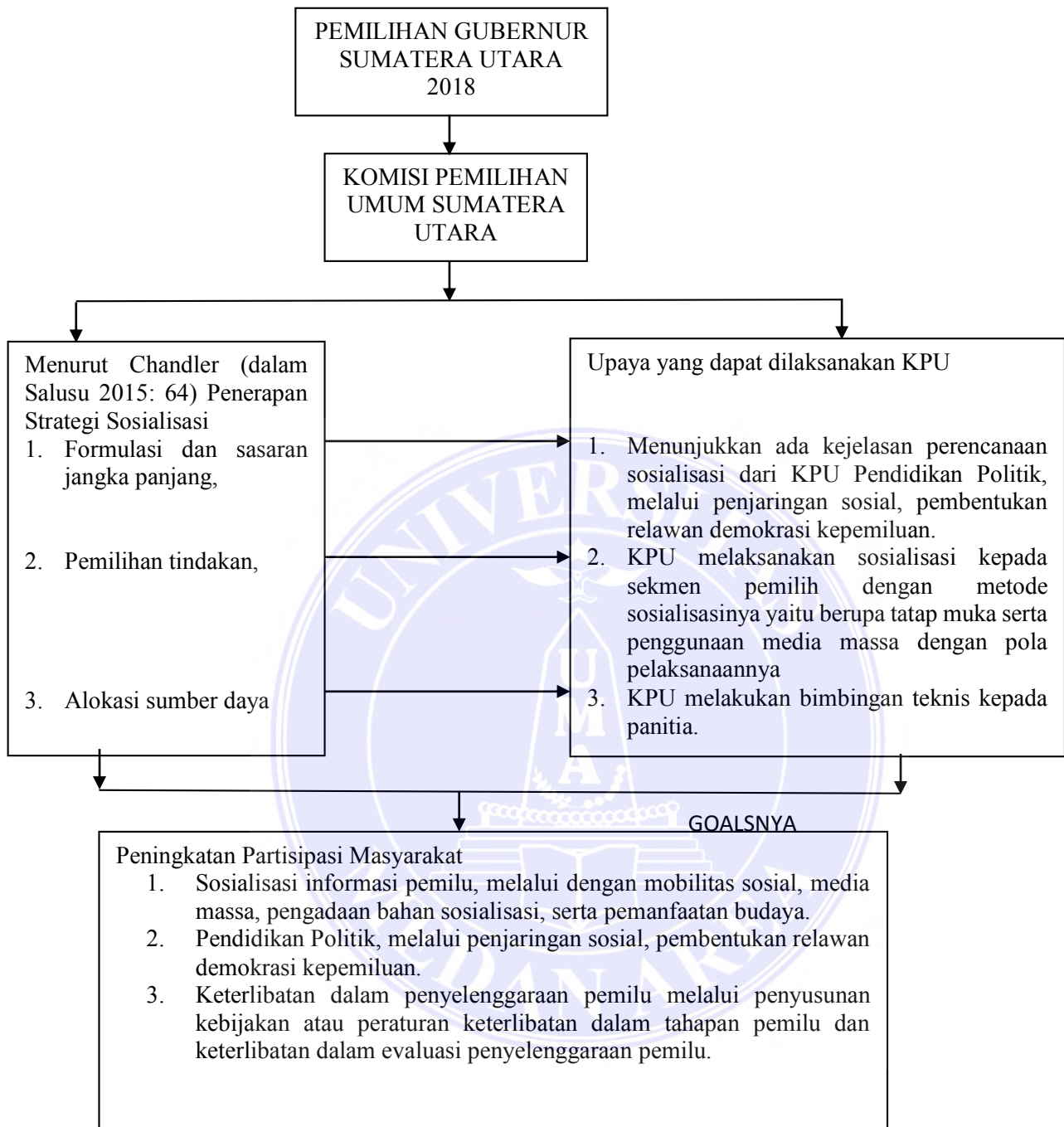
2.2 Kerangka pemikiran Penelitian

Keterlibatan masyarakat dalam konstelasi pilkada menuntut adanya partisipasi dari masyarakat. Partisipasi yang tinggi dari masyarakat dalam pilkada juga mengisyaratkan kelegitimasian calon kepala daerah tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum juga dapat menjadi bukti kedewasan kita dalam berdemokrasi. Maka dari upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat harus terus dilakukan termasuk dalam memfasilitasi penyelenggaraan pilkada. Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu menyebutkan bahwa “untuk meningkatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum, sehingga dalam implementasinya dapat

mewujudkan partisipasi masyarakat untuk mendukung terlaksananya pemilihan umum yang bersih, jujur dan adil sesuai dengan spirit demokrasi dan kearifan local di Indonesia”.

Strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, Chandler (dalam Salusu 2015: 64) berpendapat terdapat tiga indikator strategi, yaitu Formulasi dan sasaran jangka panjang, yang ditandai dengan perencanaan yang mempertimbangkan beberapa aspek penting mengenai kondisi lingkungan. Pemilihan tindakan, ditandai dengan pencapaian visi dan misi serta tujuan suatu organisasi dan Sumber daya yang ditandai dengan mendukung terlaksananya suatu kegiatan. Dari ketiga langkah pelaksanaan strategi tersebut bila dilaksanakan dengan baik maka akan dapat mencapai hasil yang maksimal.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dilakukan dengan Sosialisasi informasi pemilu, melalui dengan media massa, pengadaan bahan sosialisasi, serta pemanfaatan budaya. Pendidikan Politik, melalui penjangkaran sosial, pembentukan relawan demokrasi kepemiluan. Keterlibatan dalam penyelenggaraan pemilu, melalui penyusunan kebijakan atau peraturan keterlibatan dalam tahapan pemilu.



Bagan 1. Skema Pemikiran Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut sugiyono (2014: 9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.1.2 Sifat penelitian

Sifat pada penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Narkubo dan Achmadi (2004: 44) memberikan pengertian penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi, serta juga bisa bersifat komparatif dan koleratif.

Menurut sugiyono (2005: 21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetap tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

3.1.3 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis nantinya adalah pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan No. 35 Medan.

3.1.4 Waktu penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah menentukan jadwal penelitian pada tanggal 9 April s.d 1 Mei 2018.

3.2 Informan penelitian

Informan penelitian orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu:

1. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
2. Informan Utama dalam penelitian ini yaitu Komisioner SDM dan partisipasi masyarakat
3. Informan Tambahan dalam penelitian ini yaitu masyarakat Kota Medan

3.3 Fokus Penelitian

Moleong (2006: 63) menyatakan bahwa fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian untuk memilih data yang relevan, agar tidak dimaksudkan kedalam data yang sedang dikumpulkan, walaupun data tersebut menarik. Fokus penelitian ini adalah Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara 2018, dengan mengkaji indikator strategi sebagaimana menurut Chandler (dalam Salusu 2015: 64).

- a. Formulasi dan sasaran jangka panjang
 - Merekrut relawan demokrasi
 - Mendirikan rumah pintar pemilu sebagai program nasional
 - Melibatkan warga net dan forum warga untuk lebih meningkatkan aktifitas warga Sumatera utara
- b. Pemilihan tindakan
 - Melakukan program-program Komisi Pemilihan Umum dalam formulasi dan sasaran jangka panjang.
 - Forum warga menjadi tindakan Komisi Pemilihan Umum yang paling efektif.
- c. Alokasi Sumber Daya
 - Komisi Pemilihan Umum memiliki keterbatasan sumber daya dalam upaya mendukung peningkatan partisipasi masyarakat di Sumatera Utara.
 - Komisi Pemilihan Umum juga mengaitkan masalah dana terlaksana tidaknya program-program Komisi Pemilihan Umum.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta wawancara mendalam dan dokumentasi. Catherine Marshall, Gretchen B. Rossman (dalam Sugiyono, 2008: 310) menyatakan bahwa “*the fundamental methods relied on by qualitative researchers for gathering information are, participation in the setting, direct observation, in-depth interviewing, document review*”.

1. Observasi

Chatrine Marshall (dalam Sugiyono, 2008:310) menyatakan bahwa “*through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*”.

Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

Sanafiah Faisal (dalam Sugiyono, 2008: 310) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi, observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation dan covert observation*), dan observasi yang tak berstruktur (*unstructured observation*).

Pengamatan/Observasi sebagai metode ilmiah observasi dapat diartikan sebagai pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan sengaja dilakukan dengan melakukan alat indra terutama mata terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat dianalisa pada waktu kejadian itu terjadi. Di bandingkan metode survei observasi lebih obyektif. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang akan diteliti. Dimana dilakukan pengamatan atau pemusatan perhatian terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat indra, jadi mengobservasi dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.

2. Wawancara

Esterberg (dalam Sugiyono, 2008: 317) mendefinisikan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2008: 318) jadi, dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap semua catatan dan dokumen yang dimiliki oleh organisasi yang terpilih sebagai objek penelitian, atau data dari individu sebagai objek penelitian.

4. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Dalam hal triangulasi, Susan Stainback (Sugiyono, 2008: 330) menyatakan bahwa tujuan triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.

Selanjutnya Mathinson (Sugiyono, 2008: 332) mengemukakan bahwa nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh meluas, tidak konsisten atau kontradiksi, tuntas dan pasti. Melalui triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti melalui triangulasi. Dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan suatu pendekatan.

Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: Triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber data, triangulasi teori.

Untuk mengurangi bias maka dilakukan proses triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara *cross check* data dengan fakta dari informan yang berbeda dan dari hasil penelitian lainnya, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan cara menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu metode wawancara mendalam dan observasi.

3.5 Teknik Analisa Data

Analisa data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat

wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2008: 337), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi data

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

2. Penyajian data

Penyajian Data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun, dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dalam hal ini Miles Huberman (Sugiyono, 2008: 341) untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk itu diusahakan untuk mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, dan lain sebagainya. Jadi dari data tersebut diusahakan untuk mengambil suatu kesimpulan verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmadi dan Narkubo. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta. Bumi aksara
- Alfian. 1992. *Sosiologi Politik*. Jakarta. Rajawali
- Kantaprawira, Rusadi. 2004. *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Bandung. Sinar Baru Argensindo
- Komaruddin. 2005. *Persoalan Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Bandung. Bandung Alumni
- Manik, Kamil Husni dkk. 2014. *Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2014*. Jakarta.
- Maran. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta. Asdi Mahasatya
- Moleong, J, Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Mz hollyson Rahmat. 2015. *Pilkada*. Jakarta. Pilkada Serentak
- Rahman Arifin. 2002. *Sistem Politik Indonesia*. Surabaya
- Rush, M, Dan Althoff, P. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Salusu. 2006. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Salusu. 2015. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta
- , 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- , 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- , 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Supriyono, Arif. 2014. *Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu*. Jakarta Selatan. Perludem.

UNDANG-UNDANG

UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu

JURNAL

Haryono, Dwi. 2016. “Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2015” *Journal Administrative Reform*, Vol.4.No.2. Diakses pada tanggal 13 november 2017 pada pukul 10.00 WIB.

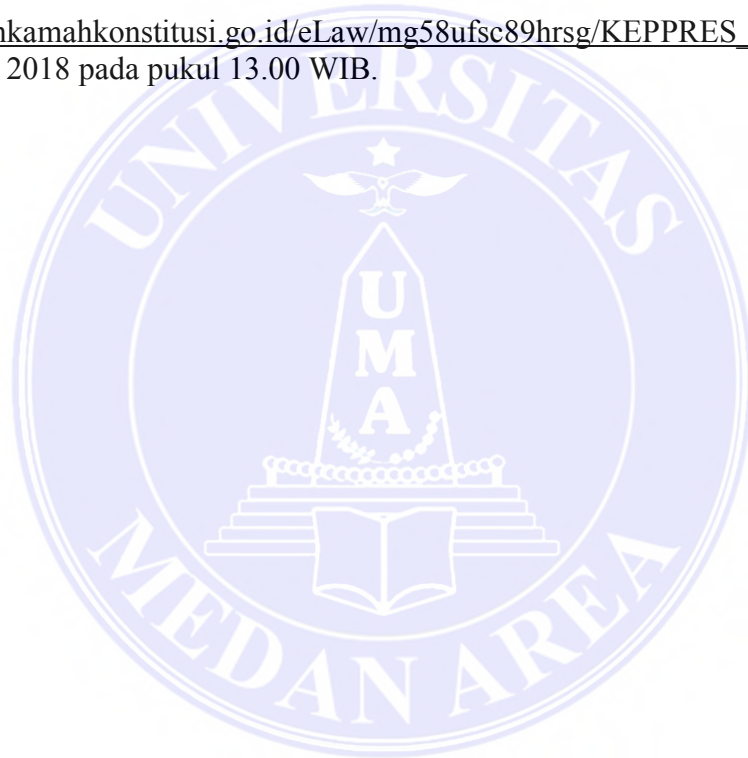
Gleko Petrus, 2017. “Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilukada” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Malang*. Vol.6.No.1. Diakses pada tanggal 11 November 2017 pada pukul 13.00 WIB.

INTERNET/WEBSITE

(<https://news.detik.com/berita/2195547/tingkat-golput-dalam-pilgub-sumut-lebih-dari-50-persen>) Diakses pada 15 maret 2013 pada pukul 10.00 WIB

(<http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2014/8/PEMILU-1955/MzQz>) Diakses 30 April 2018 pada pukul 15.00 WIB).

(http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/KEPPRES_67_2002_ok.pdf) Diakses 30 April 2018 pada pukul 13.00 WIB.



DOKUMENTASI PENELITIAN

GAMBAR 1



Wawancara dengan Bapak Mulia Banurea sebagai Ketua KPU Provinsi Sumut pada hari Selasa, 16 April 2018 Pukul 12.45 WIB

GAMBAR 2



Wawancara dengan Bapak Yulhasni sebagai Komisariat bagian Parmas dan SDM di KPU Provinsi Sumut pada hari Selasa, 16 April 2018 Pukul 13.10 WIB

Gambar 3



KPU Sumut menggelar bimbingan teknis Sosialisasi dan Inovasi Sosialisasi Pilkada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Kamis (22 Maret 2018)

Gambar 4



KPU Go To Kampus di USU pada 14 April 2018

Gambar 5



Sosialisasi Pilgubsu, KPU sumut gunakan cara kreatif

